



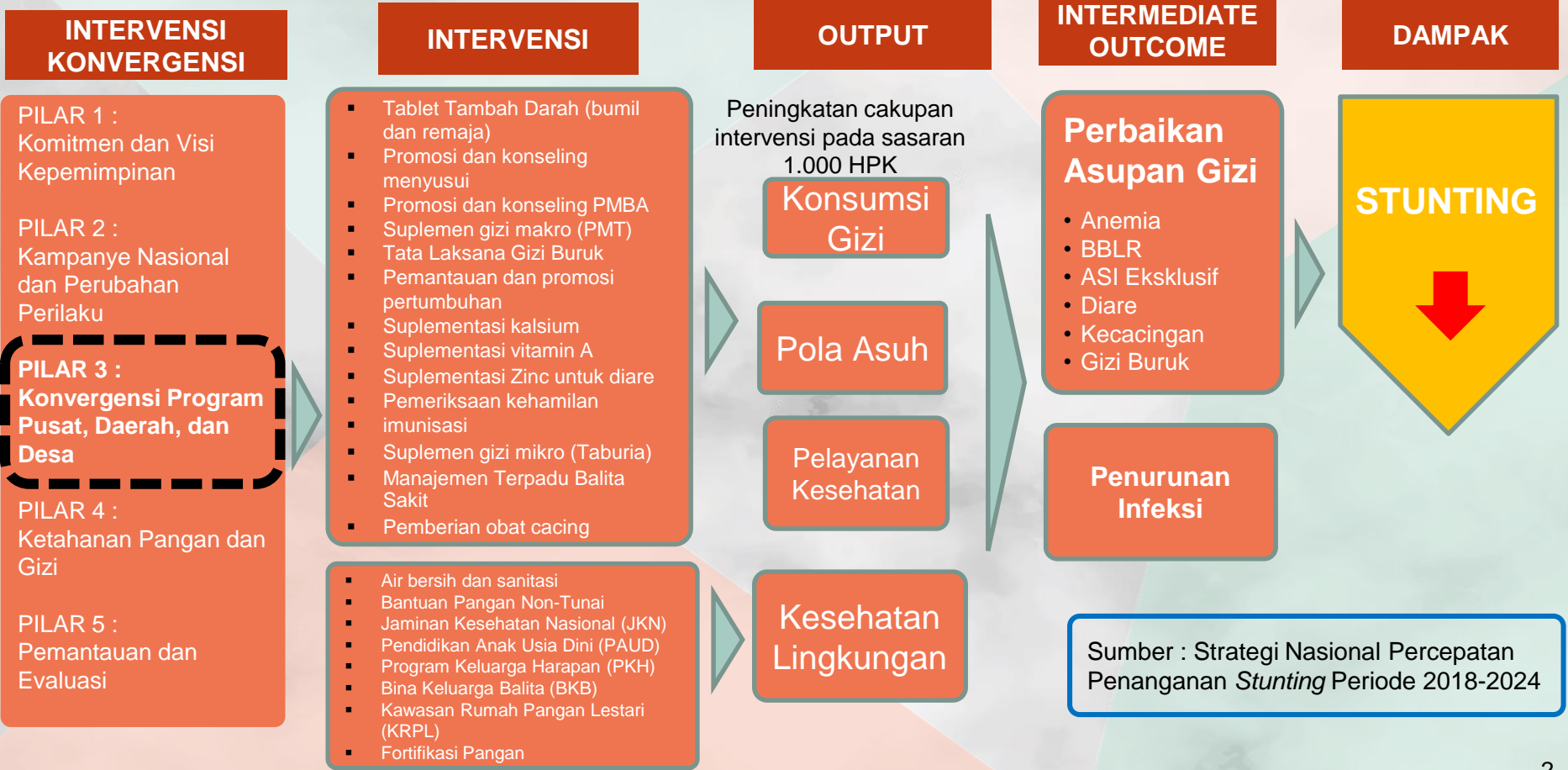
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Untuk Pencegahan Stunting

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
24 November 2020

Kerangka Konseptual Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi



TKDD Pendukung Intervensi Pencegahan Stunting



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERimbangan KEUANGAN

AKSI INTEGRASI/KONVERGENSI (APBN, APBD dan/ atau APB-Desa)

dibiayai dengan
BOK STUNTING

APBN



Dilaksanakan melalui Anggaran Kementerian/Lembaga

DAK Nonfisik



BOK



BOKB



BOP
PAUD*
Pangan &
Pertanian*



DAK Fisik



LH*



Air Minum



Kesehatan



Sanitasi

Dana Desa + DID



Dilaksanakan melalui Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh KemendesaPDTT

Perubahan bidang disepakati bersama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L Teknis

Penggunaan dana mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

*) Jenis/Bidang/Subbidang baru di TA 2021

Dasar Hukum

PMK No. 61/PMK.07/2019

Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

PMK No. 130/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik

Petunjuk Teknis DAK Fisik
TA 2020*
Perpres No. 88 Tahun 2019

Petunjuk Operasional DAK
Fisik TA 2020*
Peraturan Menteri Kesehatan
No. 85 Tahun 2019

PMK No. 48/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik

Petunjuk Operasional DAK
Nonfisik TA 2020*
Peraturan Menteri Kesehatan
No. 86 Tahun 2019

*) Juknis/Jukop diatur setiap tahun

PMK No. 205/PMK.07/2019 dan PMK 167/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Desa
dan DID

- Kewajiban penyampaian Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* melalui aplikasi OMSPAN
- *Kinerja penanganan Stunting dalam penilaian DID*

**) Direlaksasi dengan PMK 156/2020 utk mendukung pelaksanaan BLT Desa

Kebijakan DAK FISIK Pendukung Intervensi Pencegahan Stunting

DAK FISIK 2019 – 2020

untuk Program Pencegahan Stunting



- Realisasi Penyerapan DAK Fisik untuk pencegahan stunting TA 2019 di daerah belum terlalu optimal karena masih dibawah 90%
- Realisasi penyaluran DAK Fisik untuk pencegahan stunting TA 2020 cenderung meningkat namun persentase penyaluran 2 bidang masih dibawah 90%

*data per 14 Oktober 2020
(Penyaluran sudah Final)

(dalam miliar rupiah)

Bidang/ Subbidang	2019			2020		
	Pagu	Realisasi (Penyerapan)	%	Perpres 72	Penyaluran	%
Kesehatan	613,88	454,59	74,05%	692,70	584,23	84,34%
Sanitasi	742,84	634,39	85,40%	1.833,65	1.766,59	96,34%
Air Minum	764,26	603,54	78,97%	1.515,87	1.355,35	89,41%
Total	2.120,99	1.692,52	79,80%	4.042,22	3.706,17	91,69%

Bidang/Subbidang/Menu 2020

Air Minum

- Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP
- Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
- Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun
- Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP Terlindungi Individual/Komunal

Sanitasi

- Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Kesehatan

Penurunan Stunting (KB) (Subbidang)

- Pengadaan BKB Kit Stunting

Penguatan Intervensi Stunting (Subbidang)

- Feeding Center
- Penyediaan Makanan Tambahan
- Penyediaan Alat Antropometri
- Obat Gizi

Penurunan AKI-AKB (Subbidang)

- Penguatan UTD/BDRS
- Penguatan Puskesmas PONEK
- Penguatan RS PONEK
- Penyediaan Obat Kegawatdaruratan Maternal Neonatal

Jenis, Bidang, dan Tema DAK FISIK 2021



Jenis Reguler

Rp43,01 T (65,92%)



Pendidikan



Kesehatan

Tema Konektivitas *

Rp9,14 T (14,01%)



Jalan



Transportasi Perdesaan



Transportasi Perairan/Laut

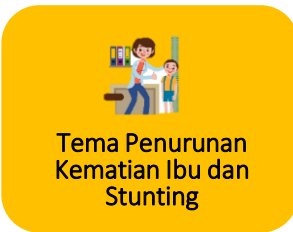
*) Transportasi Perdesaan dan Transportasi Perairan/Laut difokuskan untuk daerah berciri afirmasi



Jenis Penugasan**

Rp22,24 T (34,08%)

**) Termasuk untuk daerah berciri afirmasi



Tema Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting



Kesehatan



KB



Sanitasi



Air Minum



LHK

Rp7,35 T (11,27%)



Tema
Penanggulangan
Kemiskinan



Sanitasi



Air Minum



Perumahan
Permukiman

Rp4,17 T
(6,39%)



Tema Ketahanan
Pangan



Pertanian



Perikanan



Irigasi



Jalan



LHK

Rp6,89 T (10,56%)



Tema Penyediaan
Infrastruktur Ekonomi
Berkelanjutan



IKM



Pariwisata



Jalan



Rp3,83 T
(5,87%)



Penyusunan RK

- Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
dilakukan paling lambat s.d. Desember

Terkait Program Pencegahan Stunting

- Pemilihan prioritas kepada lokasi yang beririsan atau lebih dari satu bidang DAK Fisik Tematik dengan lokasi berstatus Approved atau *Stock Program*
- Pembahasan secara konvergensi melibatkan lintas sektor

DAK FISIK 2021 untuk Program Pencegahan Stunting



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DAK FISIK JENIS PENUGASAN

dalam miliar rupiah

Tema Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	7.351,3
· Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	5.249,7
- Kesehatan	5.149,7
- KB	100,0
· Bidang Air Minum	828,9
· Bidang Sanitasi	1.000,0
· Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	272,6

KESEHATAN

- Penguatan promosi, surveillans gizi dan tata laksana gizi
- Penyediaan makanan tambahan
- Penguatan puskesmas poned
- Penguatan rumah sakit PONEK
- Penguatan peran PSC 119

KELUARGA BERENCANA

- Penyediaan alat bermain untuk Baduta
- Penyediaan sarana KIT siap nikah anti stunting

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Pembangunan *early warning system* untuk bencana lingkungan hidup melalui pembangunan alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online dan pengadaan peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan merkuri dalam rangka penanganan stunting
- Pengelolaan persampahan serta sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penanganan stunting

AIR MINUM DAN SANITASI

- Penyediaan akses air minum melalui perluasan/pembangunan/peningkatan SPAM jaringan perpipaan dan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan.
- Penyediaan akses sanitasi melalui Pembangunan/Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat/Setempat
- Penyediaan akses sanitasi melalui sarana dan prasarana pengolahan sampah berupa pembangunan TPS3R.

Kebijakan DAK Non Fisik Pendukung Intervensi Pencegahan Stunting

DAK NONFISIK 2019 – 2020

untuk Program Pencegahan Stunting

Dalam Miliar Rupiah



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

	Alokasi	Penyaluran	%Salur	Penyerapan	%Penyerapan/ Alokasi
2019	1,695.49	1,640.21	96.74%	611.21	36.05%
Stunting-BOKB	32.54	32.54	100.00%	27.79	85.40%
Stunting-BOK	120.00	120.00	100.00%	82.91	69.09%
BOP Paud	1,542.96	1,487.67	96.42%	500.51	32.44%
2020	2,701.60	2,608.75	96.56%	459.72	17.02%
Stunting-BOKB	56.10	53.03	94.52%	9.13	16.27%
Stunting-BOK	195.00	174.00	89.23%	26.88	13.79%
BOP Paud	2,450.49	2,381.73	97.19%	423.71	17.29%

Data per 23 November 2020

BOKB

- Subkegiatan BOKB Desa Stunting
 - 2019** dengan alokasi **Rp32.5M** (159 daerah)
 - 2020** dengan alokasi **Rp56,1 M** (258 daerah) pada kegiatan Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB
- Diusulkan oleh BKKBN.
- Persentase salur dan serap 2019 masing-masing adalah sebesar 100% dan 85.40%

BOK

- Subkegiatan BOK Stunting
 - 2019** dengan alokasi **Rp120M** (160 daerah)
 - 2020** dengan alokasi **Rp195M** (260 daerah)
- Diusulkan oleh Kementerian Kesehatan.
- Rata-rata per daerah Rp.750 juta
- Persentase salur dan serap 2019 masing-masing adalah sebesar 100% dan 69,09%

BOP PAUD

- Dalam BOP Paud terdapat kegiatan untuk program pencegahan stunting yaitu kegiatan dukungan pembelajaran.
- Alokasi untuk kegiatan dukungan pembelajaran (terkait dengan stunting) baru diketahui setelah pemda menyampaikan laporan.
- Pada TA 2019, 32,44% dari pagu BOP Paud digunakan untuk kegiatan dukungan pembelajaran
- Pada TA 2020, baru 17.29% dari pagu BOP yang digunakan untuk dukungan pembelajaran (data masih berjalan)

! Rata-rata penyerapan 2020 masih rendah karena pelaksanaannya terkendala Covid-19

DAK Nonfisik

untuk Program Penurunan Stunting



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERimbangan KEUANGAN

Dukungan Dana BOK untuk Program Penurunan Stunting melalui :

BOK Stunting

Ditujukan untuk :

- Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
- Mendorong upaya konvergensi lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting.

BOK Stunting dikelola dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda).

BOK Dinas Kab./Kota

- Peningkatan Mutu dan Konsumsi Gizi : Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting
- Mobilisasi sosial/masyarakat percepatan pencegahan stunting

BOK Dinas Provinsi

Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting

BOK Dinas Puskesmas

- Penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting dimulai dari masa remaja, ibu hamil, sampai dengan anak berumur dua tahun.
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting di level kecamatan/desa

Dukungan Dana BOKB untuk Program Penurunan Stunting melalui :

Kegiatan Operasional Pencegahan Stunting

Ditujukan untuk meningkatkan peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun dan menurunkan prevalensi stunting di Kampung KB

DAK NONFISIK 2021

untuk Program Pencegahan Stunting



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Subkegiatan BOK Stunting

- **2021** dengan alokasi **Rp270 M** (360 daerah)
- Diusulkan oleh Kementerian Kesehatan
- Rata – rata per daerah Rp750 juta

Subkegiatan BOKB Desa Stunting

- **2021** dengan alokasi **Rp221 M** (360 daerah)
- Diusulkan oleh BKKBN

BOP PAUD

- **2021** dengan alokasi **Rp4.0 T**
Alokasi untuk kegiatan dukungan pembelajaran (terkait dengan stunting) baru diketahui setelah pemda menyampaikan laporan

Ketahanan Pangan dan Pertanian

- **2021** dengan alokasi **Rp204 M** (451 daerah)

- **Alokasi Untuk Dukungan Stunting Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya Daerah lokus stunting dari 260 lokus menjadi 360 lokus**
- **Pada Tahun 2021 terdapat Jenis dana DAK Nonfisik yang baru yang mendukung program pencegahan stunting, yaitu Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Kebijakan Dana Desa Pendukung Intervensi Pencegahan Stunting

DANA DESA Mendukung Pencegahan Stunting



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERimbangan KEUANGAN

Realisasi Penyerapan Dana Desa 2015-2020:

Penyerapan Dana Desa diatas 99%

Tahun	Pagu (Rp triliun)	Realisasi (Rp triliun)	%
2015	20,76	20,76	100,0%
2016	46,98	46,68	99,4%
2017	60,00	59,76	99,6%
2018	60,00	59,86	99,8%
2019	70,00	69,81	99,7%
2020	71,19	63,60*	89,34%

*) data per 23 November 2020

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- peningkatan kualitas hidup;
- peningkatan kesejahteraan;
- penanggulangan kemiskinan; dan
- peningkatan pelayanan publik.

Antara lain diutamakan untuk:
Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)

- Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan: a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil; b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
- menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
- menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
- penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
- menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
- penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
- memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
- meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
- pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
- bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

DANA DESA TA 2021

MENDUKUNG PENCEGAHAN STUNTING



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

PAGU DANA
DESA TA 2021 :
Rp 72 triliun

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. *program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan*
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Antara lain:

Pencegahan stunting di Desa sbb:

1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan
5. gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

KEWAJIBAN PELAPORAN KONVERGENSI STUNTING DALAM PENYALURAN DANA DESA 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERimbangan KEUANGAN

“Penguatan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan stunting”
(PMK tentang Pengelolaan Dana Desa)

Sejak dana desa tahun 2019

Berlaku Wajib pada tahun 2021

Penambahan persyaratan dalam penyaluran Dana Desa Tahap III, berupa: laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya*

11.156 desa dari 48.530 desa (22,99%) di 251 Kab/Kota prioritas stunting yang menyampaikan laporan konvergensi stunting

*) Data OMSPAN per 23 November 2020:

FORMAT LAPORAN

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1,000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1,000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1,000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1,000 HPK					
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN SELAMA MEHUMAN PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Kebijakan DID

Pendukung Intervensi

Pencegahan Stunting

INDIKATOR DID 2020 – DID 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan **insentif/penghargaan** kepada daerah **atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja** di bidang **tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat**

Kriteria Utama

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan e-Government (e-budgiting dan e-procurement)

Kategori Kinerja

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah

- Kemandirian Daerah
- Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
- Creative Financing
- Mandatory spending
- Ketepatan waktu pelaporan

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

- Angka Partisipasi Murni
- Peta Mutu Pendidikan
- Rata-rata Nilai Ujian Nasional

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

- Penanganan *Stunting* (Baduta)
- Baduta yang mendapatkan imunisasi lengkap
- Persalinan di fasilitas kesehatan

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

- Akses sanitasi Layak
- Sumber air minum layak

5. Kesejahteraan Masyarakat

- Penurunan Penduduk Miskin
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Inovasi Pemerintah Daerah

7. Peningkatan ekspor

8. Peningkatan Investasi

9. Pengelolaan Sampah plastik

Kriteria Utama

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan e-Government (e-budgiting, dan e-procurement)

Kategori Kinerja

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah

- Kemandirian Daerah
- Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
- Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

- Angka Partisipasi Murni
- Peta Mutu Pendidikan

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

- Penanganan *Stunting* (Balita)
- Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
- Persalinan di fasilitas kesehatan

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

- Akses sanitasi Layak
- Sumber air minum layak

5. Kesejahteraan Masyarakat

- Penurunan Penduduk Miskin
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Penurunan Angka Pengangguran (baru)

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Penghargaan Pembangunan Daerah
- Inovasi Daerah

7. Peningkatan ekspor

8. Peningkatan Investasi

9. Pengelolaan Sampah

10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru)

11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru)

DID Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan dan Infrastruktur



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas gizi bayi, kesehatan anak, dan harapan hidup bayi dalam mendorong peningkatan kecerdasan dan produktivitas anak melalui penurunan angka persentase Balita dengan status gizi stunting, kesehatan anak dan penurunan angka kematian ibu dan anak saat proses persalinan.

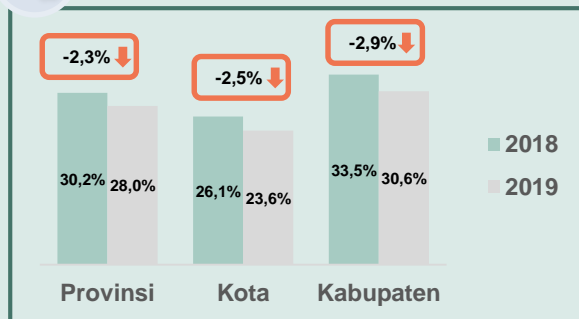
Alokasi DID 2020 – 2021 Per Kategori pada Bidang Kesehatan dan Infrastruktur

Dalam Miliar

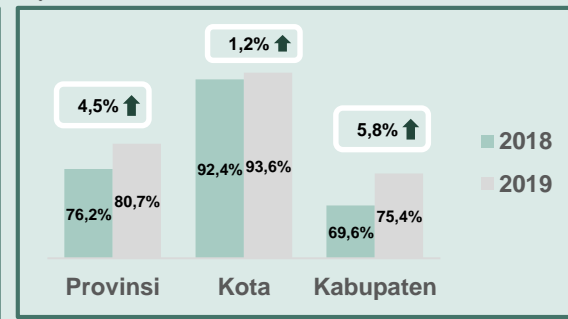
	Stunting	Imunisasi	Persalinan	Air Minum	Sanitasi
■ DID 2020	Rp1.078,15	Rp1.334,34	Rp757,91	Rp757,91	Rp779,25
■ DID 2021	Rp969,45	Rp615,23	Rp531,33	Rp969,45	Rp577,94



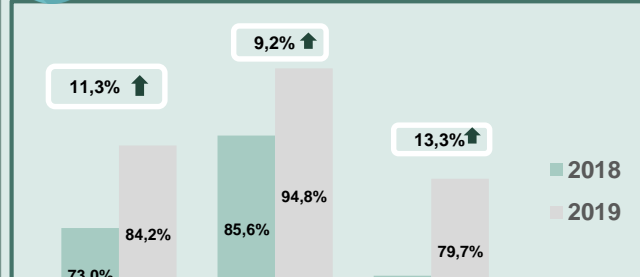
Persentase Balita Stunting



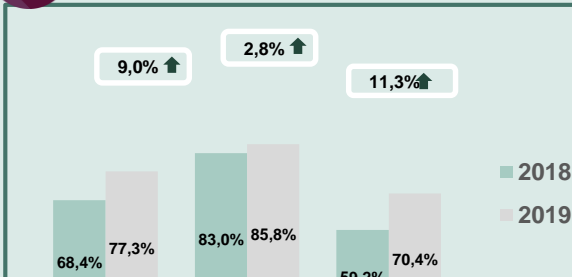
Persentase Persalinan di Faskes



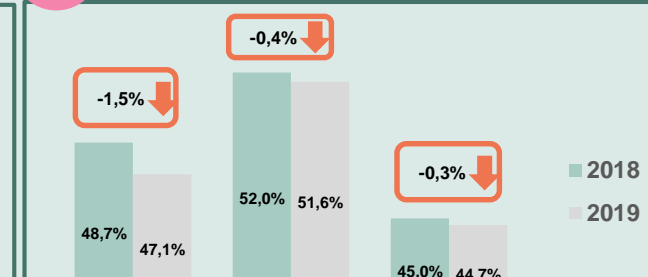
Persentase Sumber Air Minum Layak



Persentase Sanitasi Layak



Persentase Balita Imunisasi Lengkap



KENDALA DAN TANTANGAN

1. Kurangnya koordinasi lintas sektor di pemerintah pusat dan daerah
2. Daerah lokus belum mengetahui menu-menu DAK Fisik terkait stunting
3. Kurangnya pemahaman daerah atas stunting
4. Penyusunan laporan pelaksanaan penanganan stunting di desa

MEKANISME MONITORING

1. Memantau proses usulan daerah DAK Fisik (untuk melihat daerah-daerah lokus yang belum mengusulkan)
2. Memantau usulan daerah DAK Fisik (menu, jenis usulan, dan unit cost)
3. Memantau kinerja pelaksanaan di daerah (penyaluran dan penyerapan)

RENCANA 2020 UNTUK TA 2021

1. Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan KL terkait potensi bidang-bidang yg dapat mendukung penanggulangan stunting dalam DAK Fisik
2. Mengevaluasi menu stunting DAK Fisik 2021
3. Sosialisasi menu stunting kepada daerah lokus
4. Merumuskan kebijakan insentif atas kinerja daerah untuk menanggulangi stunting
5. Penyusunan Perpres Stranas Penanggulangan Stunting
6. Penyempurnaan mekanisme pemantauan penggunaan BOK dan BOKB
7. Sosialisasi kewajiban pelaporan stunting sebagai syarat penyaluran Dana Desa

TERIMA KASIH



**facebook.com/DirektoratJenderalPerimbangan
Keuangan**

@DitjenPK



www.djpk.kemenkeu.go.id

@DitjenPK



Ditjen PK Kemenkeu RI